



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR: 188/256/K/411.013/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM  
BAGI NARASUMBER PENYUSUNAN  
LAPORAN EVALUASI KINERJA PENJABAT BUPATI NGANJUK  
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta dalam rangka penyempurnaan penyusunan laporan evaluasi kinerja Pejabat Bupati Nganjuk periode triwulan III Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Penetapan Besaran Honorarium Bagi Narasumber Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Bupati Nganjuk Periode Triwulan III Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM BAGI NARASUMBER PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA PENJABAT BUPATI NGANJUK PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2024.**

- KESATU : Menunjuk Narasumber dan Menetapkan Besaran Honorarium Bagi Narasumber Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Bupati Nganjuk Periode Triwulan III Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan :
- a. menerima konsultasi penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Bupati Nganjuk Periode Triwulan III Tahun 2024 ;
  - b. melakukan asistensi penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Bupati Nganjuk Periode Triwulan III Tahun 2024; dan
  - c. memberikan rekomendasi perbaikan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Bupati Nganjuk Periode Triwulan III Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

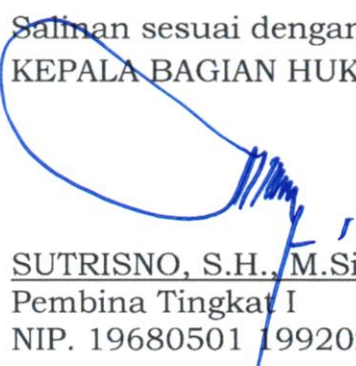
Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 6 Juni 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

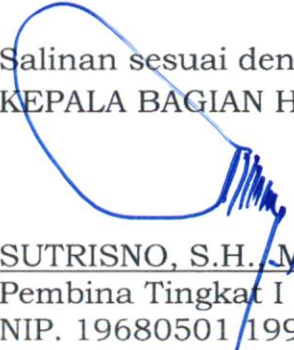
NOMOR 188/256/K/411.013/2024

TENTANG KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM BAGI NARASUMBER PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA PENJABAT BUPATI NGANJUK PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2024.

PENUNJUKAN NARASUMBER PENYUSUNAN  
LAPORAN EVALUASI KINERJA PENJABAT BUPATI NGANJUK  
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM PER ORANG/JAM (Rp)
1.	Brigjen Pol. Rustam Mansur, S.I.K	Inspektur I pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.	1.000.000
2.	Muhammad Damiyathi, S.Sos, M.TP	PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.	1.000.000
3.	Dr. Elfin Elyas	Inspektur III pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.	1.000.000
4.	Drs. Azwan, M.Si	PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.	1.000.000
5.	Bachtiar Sinaga, SE, MM, CRGP,CGCAE	PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.	1.000.000
6.	Drs. Kusna Heriman, MH	PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.	1.000.000
7.	Yosephus Nugraha	PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.	1.000.000
8.	Maharina Desimaria, S.Sos, M.AP, M.A	Kepala Bagian Analisis, Evaluasi, Dan Informasi Hasil pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.	850.000
9.	Yohanes Raheradi W, S.Tr.IP	Analisis Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.	400.000

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H./M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501/199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA